



BUPATI BLORA

KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 040/1688/2013

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNTUK SELURUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
KECAMATAN
SE KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca Berita Acara Kesepakatan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dan Peraturan Bupati Blora Nomor 65 B Tahun 2011.
- Menimbang : a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan untuk Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan se Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan se Kabupaten Blora sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Blora, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah / dan Kecamatan se Kabupaten Blora dalam pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 - 12 - 2013

BUPATI BLORA,

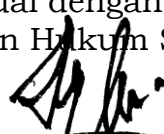
Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
5. Inspektur Kabupaten Blora;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Blora;
7. Kepala DPPKKI Kab. Blora selaku PPID Kab. Blora;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 040/1688/2013
 TANGGAL : 23-12-2013

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN SE KABUPATEN BLORA

NO	SKPD	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Biodata Elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA dan DPA) PNS (data base)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c (2)	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.	Melindungi keamanan dan kerahasiaan dokumen negara.

2.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang mengajukan perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Daftar nilai DP-3 PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. - PP No. 14 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6. 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

	Data Rekam Medis PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. - Pamenkes RI No. 269/MENKES/PE R/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10) 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Dapat merugikan PNS. - Melanggar HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. - Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS.
	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000. 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.

			No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000.				
	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Untuk menjamin rekaman kegiatan peristiwa.	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
	Dokumen penawaran kontrak		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j. - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Dapat menjaga obyektivitas penilaian.
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler. - Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus. - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. - Reviu Laporan Keuangan. 		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 	LHP jika dikuasai oleh orang / pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP. LHP belum bersifat final.	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/b 03/ 2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a. 				
3.	Kantor Ketahanan Pangan	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan	Alokasi Anggaran Pemugaran Rumah	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Akan timbul ketidakpuasan antara penerima bantuan pemugaran rumah yang satu dengan yang lainnya.	Pemugaran rumah berjalan lancar

	dan Keluarga Berencana						
		DPA SKPD	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Tidak disalahgunakan.
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perlindungan Data Pribadi Penduduk	UU NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 85 ayat 1,2 dan 3) PP 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Guna kepentingan penyidikan dari pejabat penyidik kepolisian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang administrasi kependudukan atau penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana diperbolehkan sampai penyidikan selesai. UU 23 Tahun 1996 Pasal 88 ayat 1,2,3	Mengungkapkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi oleh Negara.	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya.

		Hak Akses Data Pribadi	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 86 ayat 1, 2.		Data pribadi penduduk hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari menteri (PP 37 Tahun 2007 ayat 2)	Mengungkapkan data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya.
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah	Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Melindungi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
		Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dinas	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan Dokumen Pelaksanaan Keuangan yang belum diaudit	Melindungi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
		Daftar Presensi PNS/CPNS SKPD Dinas	UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan Dokumen Pribadi PNS yang dirahasiakan Anggaran	Melindungi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

		Buku Notula/Hasil Rapat SKPD Dinas	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan Dokumen Pelaksanaan Kinerja	Melindungi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
		Dokumen-dokumen lain yang belum diaudit oleh auditor resmi pemerintah daerah	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	Melindungi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
7.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		DPA	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i		Tidak Terbatas	Menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi dokumen
		Data mediasi perusahaan industrial antara buruh dengan perusahaan	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b		Tidak Terbatas	Mengganggu perlindungan dari usaha tidak sehat	Melindungi dari persaingan tidak sehat
		Dokumen lelang kegiatan (proyek)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b		Tidak Terbatas	Mengganggu perlindungan dari usaha tidak sehat	Melindungi dari persaingan tidak sehat
8.	Dinas Kehutanan	Biodata elektronik (database) PNS lingkup Dinas Kehutanan Kab. Blora	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Arsip/Arsip PNS lingkup Dinas Kehutanan Kab.Blora	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS lingkup Dinas Kehutanan Kab. Blora yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

9.	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Badan Kepegawaian Daerah	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Data rekam medis PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER / III/2008 tentang		Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS. - Dapat merugikan PNS - Melanggar HAM.	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS

			Reka Medis (Pasal 10)				
		Data usulan pengangkatan/ pemberhentian PNS dalam jabatan struktural & jabatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo.PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 		Tidak Terbatas	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
		Nilai/skor/rekomendasi hasil seleksi CPNS, calon kepala, Pengawas dan Pemilik sekolah	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		Dokumen pendaftaran/usulan seleksi CPNS, calon kepala, pengawas dan pemilik sekolah	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		Dokumen rincian kebutuhan/kekurangan pegawai	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga kondusifitas dan kepastian hukum

		Data usulan peserta Diklatpim TK II, III dan IV	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP no. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS 		Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan	Mengganggu proses seleksi dan memperlambat kegiatan	Menjaga kondusifitas kerja
11.	Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika	Dokumen Penawaran Kontak kegiatan bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j UU No.14/2008 - Perpres 54/2010 diubah Perpres 70/2012 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah 		Tidak Terbatas	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian
		DPA rincian kegiatan Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi	Pasal 16 ayat 1 huruf b Perbup No. 65 B Tahun 2011		Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
		DP-3 PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD 1945 - Pasal 6 PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS - Pasal 17 huruf h UU 14/2008 		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi pribadi PNS yang bersifat rahasia

12.	Sekretariat Daerah Kabupaten Blora	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13.	Inspektorat	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM. 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

			- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP				
	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan		- Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	Daftar Nilai DP-3 PNS		- Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	Data Rekam Medis PNS		- Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS. - Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

			<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 10 Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis 				
		Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
		Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Untuk menjamin rekaman kegiatan peristiwa	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen

	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan/Jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus - Reviu Laporan Keuangan - Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 ayat 3 huruf d jo Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 	<ul style="list-style-type: none"> - LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP - LHP belum bersifat final - Reviu Laporan Keuangan belum bersifat final - TLRHP merupakan satu kesatuan dengan LHP 	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

			<p>:PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendayagunaan - Aparatur Negara Nomor <p>:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah 				
		DPA dan Rinciannya	Pasal 16 ayat 1 huruf b Perbup No. 65B Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan	Rincian DPA jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

			Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	berpotensi terjadi penyalahgunaan DPA			pelaksanaan kebijakan
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
15.	Badan Lingkungan Hidup	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
16.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
17.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
18.	Dinas Kesehatan	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
19.	Dinas Pekerjaan Umum	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

20.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
21.	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen/Berkas/ PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Database Biodata elektronik PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22.	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kab. Blora	Biodata Anggota DPRD/PNS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		Dokumen/Arsip Anggota DPRD/PNS	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
		Berkas Hukuman Disiplin	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
		Risalah Rapat Pimpinan DPRD	Pasal 68, 69, 71 PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD		-sda-	Mengungkapkan hasil rapat tertutup yang bersifat rahasia	Melindungi hasil rapat tertutup yang bersifat rahasia
		Risalah Rapat Fraksi	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-

	Risalah Rapat Konsultasi	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Badan Musyawarah	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Komisi	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Gabungan Komisi	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Badan Anggaran	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Badan Legislasi	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Badan Kehormatan	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Panitia Khusus	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Kerja	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Dengar Pendapat	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum	-sda-		-sda-	-sda-	-sda-
	RKA/DPA/Dok. Pengelolaan Keuangan	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan detail pembiayaan yang bersifat rahasia	Melindungi detail pembiayaan yang bersifat rahasia
	Hasil Pemeriksaan Inspektorat	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	Melindungi hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia
	Hasil Pemeriksaaan BPK	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	Melindungi hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia

		Hasil Pemeriksaan BPKP	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia	Melindungi hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia
		Dokumen Pengadaan Dokumen Barang dan Jasa	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan dokumen lelang yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen lelang yang bersifat rahasia
		Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan dokumen kontrak yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen kontrak yang bersifat rahasia
		Dokumen Laporan dan Penyerahan Pekerjaan/Barang	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan dokumen laporan yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen laporan yang bersifat rahasia
		Surat Pengaduan Masyarakat	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		Hasil Analisis/ Legal Opinion	UU No 14 Tahun 2008		-sda-	Mengungkapkan hasil analisis yang bersifat rahasia	Melindungi hasil analisis yang bersifat rahasia
23.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
24.	RSUD DR. R Soetijono Blora	Diagnosa Penyakit Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Praktik Kedokteran 		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data penyakit yang bersifat pribadi serta melanggar Kode etik	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

		Catatan Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Praktik Kedokteran 		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data penyakit yang bersifat pribadi serta melanggar Kode etik	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
		Hasil Visum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Praktik Kedokteran 		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data penyakit yang bersifat pribadi serta melanggar Kode etik	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
		Hasil Autopsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Praktik Kedokteran 		Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
		Terapi dan Pengobatan	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP		Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
25.	RSUD R. Soeprapto	Diagnosa Penyakit Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Praktik Kedokteran 		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data penyakit yang bersifat pribadi serta melanggar Kode etik	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
		Catatan Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Praktik Kedokteran 		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data penyakit yang bersifat pribadi serta melanggar Kode etik	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
		Hasil Visum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Praktik Kedokteran 		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data penyakit yang bersifat pribadi serta melanggar Kode etik	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
		Hasil Autopsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Praktik Kedokteran 		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

		Terapi dan Pengobatan	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
26.	Kantor Kecamatan Randublatung	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
27.	Kantor Kecamatan Kedungtuban	Biodata elektronik PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang menyimpang PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS rekanan yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
28.	Kantor Kecamatan Jati	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakn oleh	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

						pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
29.	Kantor Kecamatan Cepu	Data Pribadi Kependudukan	UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab IX Pasal 84 s/d 87		Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi penduduk yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi penduduk yang bersifat rahasia
30.	Kantor Kecamatan Todanan	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

						kesalahannya diexpose	
31.	Kantor Kecamatan Ngawen	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakn oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
32.	Kantor Kecamatan Japah	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakn oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
33.	Kantor Kecamatan Tunjungan	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakn oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
34.	Kantor Kecamatan Jepon	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakn oleh	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

						pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
35.	Kantor Kecamatan Jiken	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
36.		Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17		Tidak Terbatas	Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

	Kantor Kecamatan Sambong		huruf h				
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
37.	Kantor Kecamatan Bogorejo	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

38.	Kantor Kecamatan Banjarejo	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
39.	Kantor Kecamatan Kunduran	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Terungkapnya rahasia pribadi 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

						PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose	
40.	Kantor Kecamatan Blora Kota	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	- Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
41.	Kantor Kecamatan Kradenan	Biodata elektronik PNS (database)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Terungkapnya data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	Data pribadi PNS yang bersifat rahasia dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

						tidak bertanggungjawab	
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Tidak Terbatas	- Terungkapnya rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Menimbulkan beban psikologis bagi PNS jika kesalahannya diexpose	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

BUPATI BLORA,
 Cap ttd.
 DJOKO NUGROHO